

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas DBH CHT untuk setiap Pemerintah Daerah di wilayah pengawasan TMP C Madura didapati bahwa, 1) tingkat efektivitas penggunaan DBH CHT pada Kabupaten Bangkalan dari tahun anggaran 2020 sebesar 85,79% dengan predikat cukup efektif bertahan sampai tahun anggaran 2021 dengan besaran 87,52% kemudian menurun pada tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 44,87% dengan predikat tidak efektif, 2) tingkat efektivitas penggunaan DBH CHT pada Kabupaten Sampang cukup efektif pada tahun anggaran 2020 dengan besaran 94,65% kemudian turun menjadi tidak efektif dengan besaran 56,4% pada tahun anggaran 2021 dan beranjak pulih pada tahun anggaran 2022 menjadi cukup efektif dengan predikat 85,39%, 3) tingkat efektivitas penggunaan DBH CHT Kabupaten Pamekasan yang awalnya efektif sebesar 93,14% pada tahun anggaran 2020 turun menjadi kurang efektif sebesar 78,3% pada tahun anggaran 2021 kemudian pulih menjadi cukup efektif sebesar 85,75% pada tahun anggaran 2022, dan 4) tingkat efektivitas penggunaan DBH CHT Kabupaten Sumenep mulanya kurang efektif sebesar 76,73% pada tahun anggaran 2020 naik dan bertahan menjadi efektif pada tahun anggaran 2021 dan 2022 dengan besaran 93,25% dan 95,49%.

Berdasarkan analisis menggunakan metode *Logic Model* dapat diketahui *outcomes* penggunaan DBH CHT Pemerintah Daerah di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura sebagai berikut,

1. Pada program peningkatan kualitas bahan baku Kabupaten Sampang tidak dapat membantu meningkatkan harga tembakau pada tahun 2020 sampai dengan 2022, pada Kabupaten Pamekasan terdapat kontraksi BEP pada tahun 2021 akibat pandemi *Covid-19* dan penggunaan DBH CHT tidak mampu mengantisipasinya namun pada tahun 2022 BEP tembakau mulai pulih dan pada Kabupaten Sumenep program peningkatan kualitas bahan baku dapat membantu meningkatkan BEP untuk setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan 2022.
2. Pada program pembinaan industri memiliki hasil yaitu adanya pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan Industri Tertentu Hasil Tembakau pada Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep meskipun sampai saat ini pada Kabupaten Sampang masih dalam tahap studi kelayakan dan pada Kabupaten Pamekasan terkendala dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
3. Pada program pembinaan lingkungan sosial terdapat dua indikator yaitu prevalensi balita *stunted* dan indeks ketahanan pangan, atas indikator prevalensi balita *stunted* terdapat 2 Pemerintah Daerah yang dapat melaksanakan program pembinaan lingkungan sosial dan berhasil membantu menurunkan angka prevalensi balita *stunted* dari tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu Kabupaten Sampang dan Sumenep, sedangkan pada Kabupaten

Bangkalan dan Pamekasan terjadi kenaikan angka prevalensi pada tahun 2021 namun dapat turun kembali di tahun berikutnya, sedangkan pada indeks ketahanan pangan secara umum seluruh Pemerintah Daerah di Madura mengalami peningkatan kecuali di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021 dan Kabupaten Sumenep pada tahun 2020, penurunan tersebut berarti program pembinaan lingkungan sosial belum dapat membantu untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan pada Pemerintah Daerah tersebut.

4. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dapat dinilai secara langsung melalui tingkat pemahaman masyarakat yang didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun survei tersebut belum terlaksana sehingga dilakukan penilaian melalui indikator lain yaitu menggunakan peningkatan jumlah pengusaha barang kena cukai hasil tembakau dengan hasil secara keseluruhan jumlah perusahaan rokok yang memiliki izin NPPBKC meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 11 Mei 2023, namun pada Pemerintah tertentu seperti Kabupaten Bangkalan dan Sampang, jumlah perusahaan rokok yang memiliki NPPBKC naik pada tahun 2021 namun stagnan sampai 2023, sedangkan pada Kabupaten Pamekasan justru turun pada tahun 2022 namun kemudian naik kembali di tahun 2023
5. Hasil dari program pemberantasan rokok ilegal diukur melalui tingkat peredaran rokok ilegal di Madura yang dilakukan secara langsung melalui Survei Rokok Ilegal Internal DJBC (SRI-ID) dan secara tidak langsung melalui jumlah penindakan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan hasil, tingkat peredaran rokok ilegal menurun berdasarkan SRI-ID tahun 2019

dan 2021 berarti program pemberantasan rokok ilegal mampu membantu menurunkan peredaran rokok ilegal kemudian melalui jumlah penindakan secara keseluruhan meningkat tiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang membuat tingkat kepatuhan masyarakat semakin tinggi sehingga diharapkan peredaran rokok ilegal menurun.

Adapun kendala secara umum dalam penggunaan DBH CHT di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Madura yang kemungkinan menyebabkan capaian realisasi tidak efektif dan/atau *outcomes* (hasil) yang didapat tidak sesuai yang diharap kandalam antara lain adalah,

1. Pemberian tanggung jawab sebagai sekretariat DBH CHT yang berubah-ubah pada beberapa Pemerintah Daerah dan pada Kabupaten Pamekasan penetapan sebagai sekretariat DBH CHT dilakukan pada triwulan ke tiga tepatnya pada Bulan Oktober sehingga koordinasi sekretariat pada tahun anggaran 2022 kurang maksimal;
2. Riwayat dokumentasi dari sekretariat sebelumnya tidak diserahkan kepada sekretariat tahun berjalan saat terjadi pergantian sekretariat;
3. Peraturan terkait penggunaan DBH CHT mulai tahun 2020 kurang fleksibel karena jenis-jenis kegiatan dan prioritas penggunaannya telah ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya; dan
4. Pada Kabupaten Bangkalan terdapat kendala teknis pada saat melakukan dorongan pembudidayaan tembakau dengan tujuan agar Kabupaten

Bangkalan menjadi daerah penghasil tembakau yang disebabkan tingkat kemandirian petani tembakau yang rendah.

Atas kendala-kendala tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti agar penggunaan DBH CHT pada masing-masing Pemerintah Daerah dapat lebih efektif, memiliki dampak positif dan program-programnya berkelanjutan setiap tahunnya sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang Pemerintah Daerah.